



LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2023

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Struktur Organisasi dan Fungsi	2
1.4 Sumber Daya Manusia	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1 Visium	7
2.2 Arah Pengawasan	8
2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023...	10
BAB III CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	11
3.1 Realisasi Anggaran.....	11
3.2 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja	12
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN	13
4.1 Inspektorat I	16
4.2 Inspektorat II	16
4.3 Inspektorat III	17
4.4 Inspektorat IV.....	18
4.5 Inspektorat Investigasi	18
4.6 Sekretariat Itjentan.....	19
4.6.1 Bagian Umum.....	20
4.6.2 Kelompok Perencanaan dan Evaluasi.....	22
4.6.3 Kelompok Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas (OKHH)	24
4.6.4 Kelompok Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan (DPLHP)...	26
BAB V PENUTUP.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penjabaran dan definisi visium Inspektorat Jenderal	8
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2023	10
Tabel 3. Realisasi Anggaran dan Output Kegiatan	11
Tabel 4. Realisasi Anggaran Itjentan per Jenis Belanja	12
Tabel 5. Target dan Realisasi Anggaran dan Output Inspektorat Jenderal Tahun 2023	13
Tabel 6. Rekapitulasi Kegiatan Mendukung Jaga Pangan	14
Tabel 7. Rincian Anggaran dan <i>Output</i> Inspektorat I	16
Tabel 8. Rincian Anggaran dan Output Inspektorat II.....	17
Tabel 9. Rincian Anggaran dan <i>Output</i> Inspektorat III.....	17
Tabel 10. Rincian Anggaran dan Output Inspektorat IV	18
Tabel 11. Rincian Anggaran dan Output Inspektorat Investigasi.....	19
Tabel 12. Rincian Anggaran dan <i>Output</i> Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	19
Tabel 13. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.....	25
Tabel 14. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2023.....	26
Tabel 15. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal.....	27
Tabel 16 Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Audit Investigasi.....	28
Tabel 17. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Audit Tujuan Tertentu	28
Tabel 18. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan BPKP	29
Tabel 19. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan BPK RI	30
Tabel 20. Penerbitan Laporan Semester I Tahun 2023	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementan, 2023	2
Gambar 2. Diagram Jumlah Auditor Sesuai Jenjang	4
Gambar 3. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu	5
Gambar 4. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	5
Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Gambar 6. Alokasi Anggaran Itjen dan masing-masing Kegiatan	10

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan hidayahNya, Laporan Semester I Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

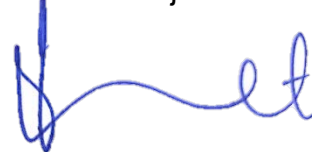
Laporan Semester I Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Selain itu, pelaporan kinerja semesteran ini merupakan wujud dari penyelenggaraan anggaran dengan pendekatan tata pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Laporan semester I Tahun 2023 ini juga dapat digunakan sebagai informasi kinerja kepada pimpinan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan selanjutnya, serta bahan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran guna pencapaian target output dan sasaran yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja (PK).

Laporan semester I Tahun 2023, bermaterikan pencapaian kinerja masing-masing unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 1 (satu) semester pada Tahun 2023. Diharapkan masing-masing unit lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian agar meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Seluruh keberhasilan dan pencapaian kinerja masing-masing unit lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Semester I dipaparkan secara jelas dan rinci.

Dalam konteks penyajiannya, laporan ini tentunya masih terdapat kekurangan serta kelemahan yang memerlukan koreksi dan masukan agar lebih informatif. Untuk itu sangat diperlukan saran dan perbaikan agar penyajiannya lebih baik lagi kedepannya.

Kami juga berharap agar Laporan Semester I Tahun 2023 dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait dan kami mengajak untuk semua pihak yang terkait untuk berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat meningkatkan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ke depan.

Jakarta, 2023
Sekretaris Itjen



Tin Latifah, SP, M.Si
NIP.197409181999032002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Jenderal pada periode tahun 2020-2024 mendukung terwujudnya Program Dukungan Manajemen dengan sasaran strategis program berupa Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 memperoleh alokasi anggaran dengan pagu sebesar Rp154.221.814.000,00.

Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp59.376.607.123 atau 38,50% dengan realisasi fisik sebesar 177 laporan atau 28,69% dari target 617 laporan.

Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian didukung oleh kinerja unit eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui realisasi anggaran dan capaian *output* kegiatan sampai dengan bulan Juni 2023 sebagai berikut:

Unit Kerja	Anggaran			Output		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
Sekretariat	56.451.264.000	22.643.702.581	40,11	110	54	49,09
Inspektorat I	20.549.386.000	9.036.045.655	43,97	118	32	27,12
Inspektorat II	20.350.000.000	6.466.559.764	31,78	98	33	33,67
Inspektorat III	20.111.872.000	8.997.033.160	44,73	105	30	28,57
Inspektorat IV	20.100.691.000	6.608.034.163	32,87	114	47	41,23
Inspektorat Investigasi	16.658.601.000	5.625.231.800	33,77	72	6	8,33
Total	154.221.814.000	59.376.607.123	38,50	617	202	32,74

Realisasi belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menurut jenis belanja sebagai berikut:

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	23.213.360.000	11.663.517.959	50,24
52	Belanja Barang	124.155.749.000	46.052.195.861	37,09
53	Belanja Modal	6.852.705.000	1.695.347.868	24,74
Jumlah		154.221.814.000	59.411.061.688	38,52

Sampai dengan Juni 2023 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan Jaga Pangan, Jaga Masa Depan di 6 (enam) provinsi, antara lain kegiatan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, sinergi APIP dan APH, dan rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan.

Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 diketahui bahwa terdapat 96 LHP dengan rekomendasi administrasi sebanyak 1.540 dengan temuan kerugian negara senilai Rp2.496.241.362,41 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 188 rekomendasi

administrasi dan temuan kerugian negara senilai Rp2.231.766.119,16. Rekapitulasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 sebagai berikut:

No	Eselon I	Jml LHP	Rekomendasi			Tindak Lanjut			Sisa			
			Adm	KN	Nilai	Adm	KN	Nilai	Adm	KN	Nilai	
1	Sekretariat Jenderal	10	101	0	0	9	0	0	92	0	0	
2	Inspektorat Jenderal	2	8	0	0	3	0	0	0	0	0	
3	Ditjen Tanaman Pangan	8	300	11	82.247.337,23	8	9	19804843,23	292	2	62.442.494,00	
4	Ditjen Hortikultura	10	245	21	192.346.388,84	92	17	180.877.888,84	153	4	11.468.500,00	
5	Ditjen Perkebunan	9	95	4	14.194.025,00	9	4	14.194.025,00	0	0	0	
6	Ditjen PKH	15	370	27	1.911.448.541,59	0	0	1.900.165.809,59	370	27	11.282.732,00	
7	Ditjen PSP	11	153	5	36.274.040,22	25	1	4.590.000,00	128	4	31.684.040,22	
8	BSIP	2	21	0	0	0	0	0	21	0	0	
9	BPPSDMP	11	102	15	95.906.684	1	14	82.637.394	101	1	13.269.290	
10	Barantan	18	145	17	163.824.345,53	41	8	29.496.158,50	104	9	134.328.187,03	
Total			96	1.540	100	2.496.241.362,41	188	53	2.231.766.119,16	1.261	47	264.475.243,25

Dalam hal monitoring laporan sampai dengan bulan Juni 2023 secara umum dijabarkan sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Terbit				Terlambat						Total ST
		Tepat Waktu		Terlambat		Masa KK		Terlambat		Batal		
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1	SES	38	12,75	144	48,32	0	0,00	115	38,59	1	0,34	298
2	IR 1	50	20,66	121	50,00	0	0,00	63	26,03	8	3,31	242
3	IR 2	46	17,56	149	56,87	0	0,00	46	17,56	21	8,02	262
4	IR 3	101	41,74	47	19,42	2	0,83	85	35,12	7	2,89	242
5	IR 4	51	24,06	92	43,40	0	0,00	63	29,72	2	0,94	212
6	IR INVES	23	12,57	55	30,05	1	0,55	91	49,73	13	7,10	183
		309		608		3		463		52		1.439

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian yang merupakan lembaga pengawasan internal independen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan menjadi “mitra pro-aktif” dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Peran aktif Inspektorat Jenderal diperlukan sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan intern yang dapat memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian telah dilakukan sesuai peraturan dan menerapkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. Bentuk peran aktif Inspektorat Jenderal dalam mengawal pembangunan pertanian di lingkup Kementerian Pertanian diselenggarakan dalam kegiatan pengawasan yang menghasilkan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi yang dimanfaatkan oleh pengelola program diharapkan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan Kementerian Pertanian. Berdasarkan hal itu, Inspektorat Jenderal dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan intern. Pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal disajikan dalam Laporan Semester I Tahun 2023 ini.

1.2 Maksud dan Tujuan

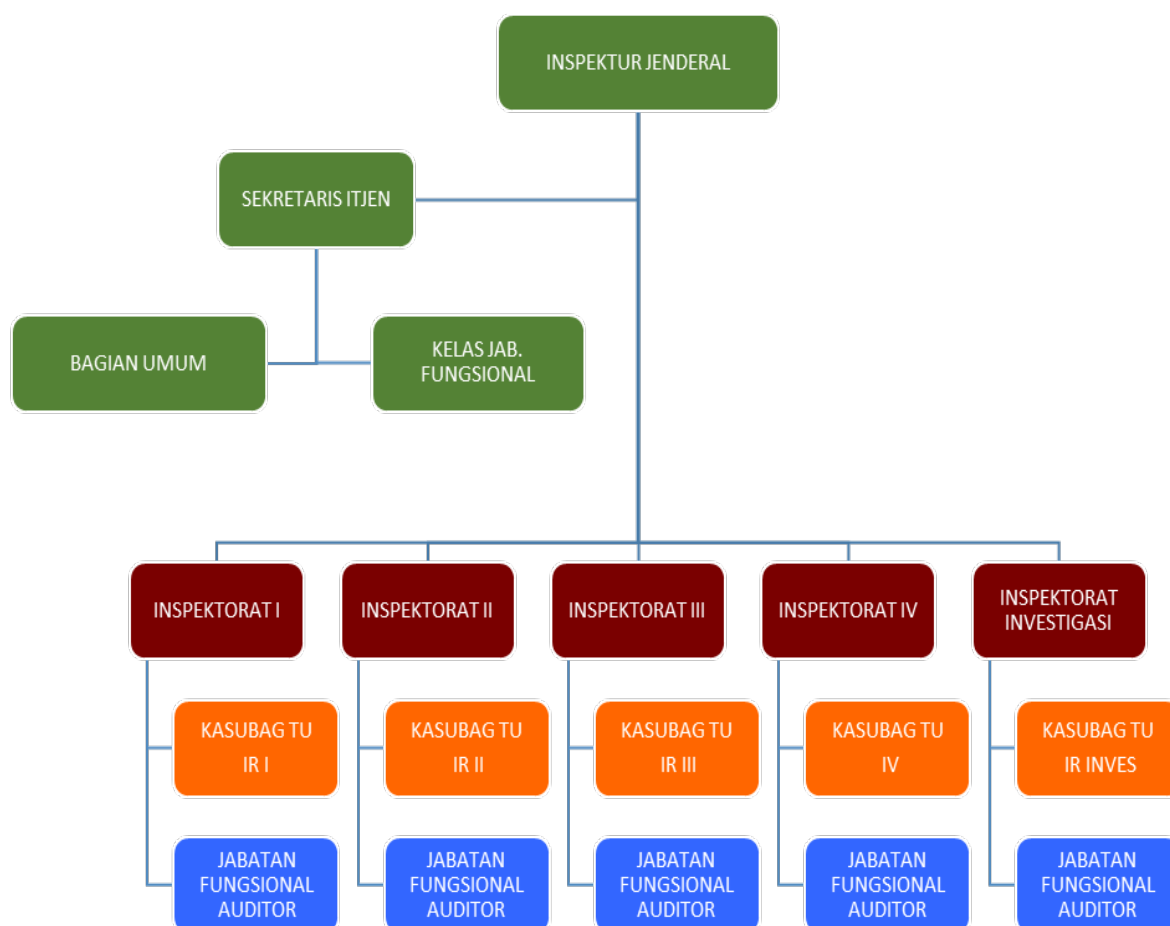
Laporan Semester I Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Semester I Tahun 2023 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dalam upaya memastikan terlaksananya program/kegiatan selama Januari sampai dengan Juni 2023.

1.3 Struktur Organisasi dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berikut gambaran struktur organisasi lingkup Inspektorat Jenderal Kementan:



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementan, 2023

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dibentuk unit Eselon II sebagai pelaksana teknis dan administratif yang terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

2. Inspektorat I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3. Inspektorat II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

4. Inspektorat III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal.

5. Inspektorat IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Jenderal, dan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian.

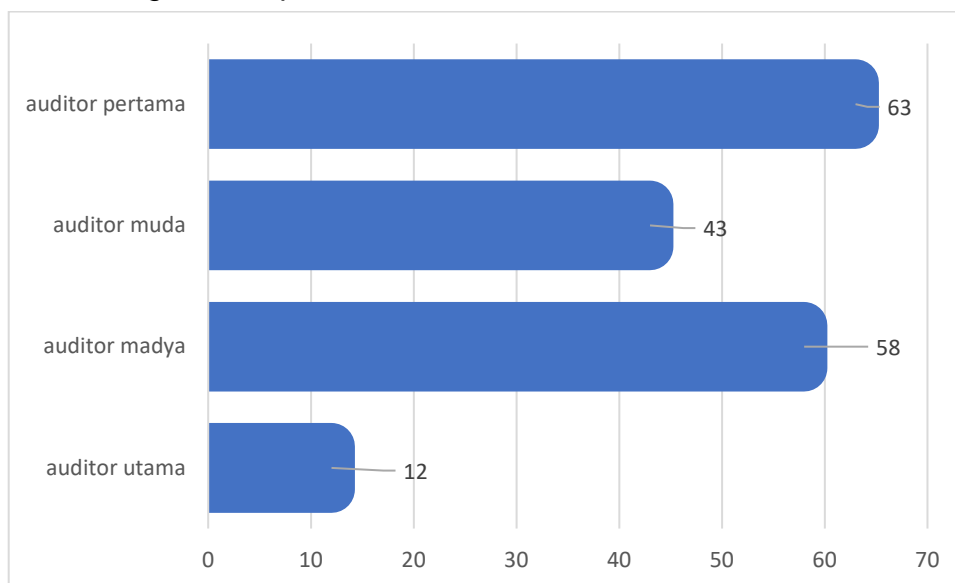
6. Inspektorat Investigasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu serta upaya pencegahan korupsi.

1.4 Sumber Daya Manusia

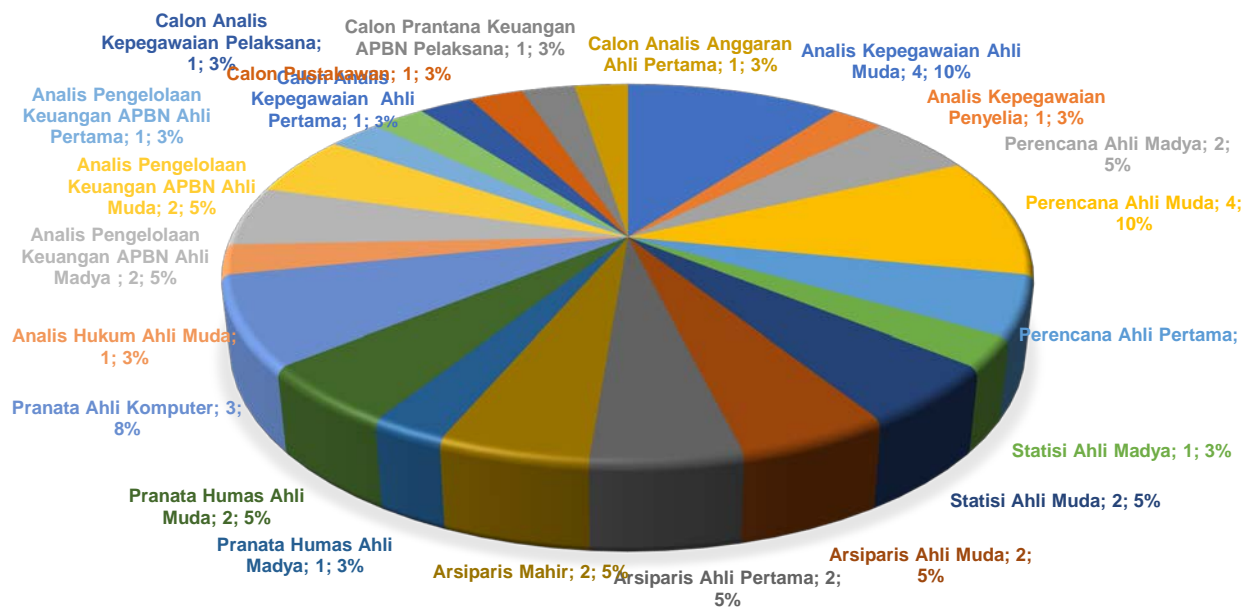
Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sampai dengan Juni 2023 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat Sumber Daya Manusia sebanyak 279 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pejabat struktural sebanyak 12 orang terdiri dari:
 - 1 orang Pejabat Eselon I
 - 5 orang Pejabat Eselon II
 - 1 orang Pejabat Eselon III
 - 5 orang Pejabat Eselon IV
2. Pejabat fungsional auditor sebanyak 176 orang dengan rincian sebagai berikut:
 - 12 orang auditor utama
 - 58 orang auditor madya
 - 43 orang auditor muda
 - 63 orang auditor pertama



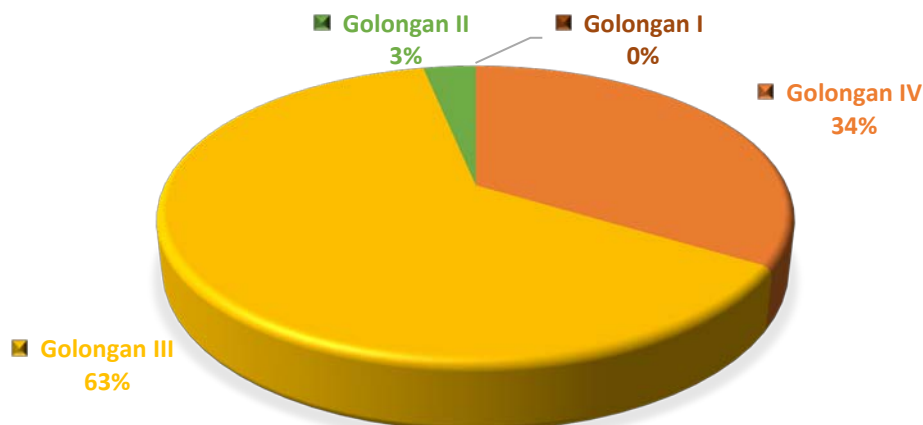
Gambar 2. Diagram Jumlah Auditor Sesuai Jenjang

3. Pejabat fungsional tertentu sebanyak 39 orang antara lain fungsional analis kepegawaian, fungsional perencanaan, pranata humas, ahli komputer, ahli hukum, pengelolaan keuangan APBN serta statistisi, dengan rincian seperti pada gambar 3. berikut:



Gambar 3. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

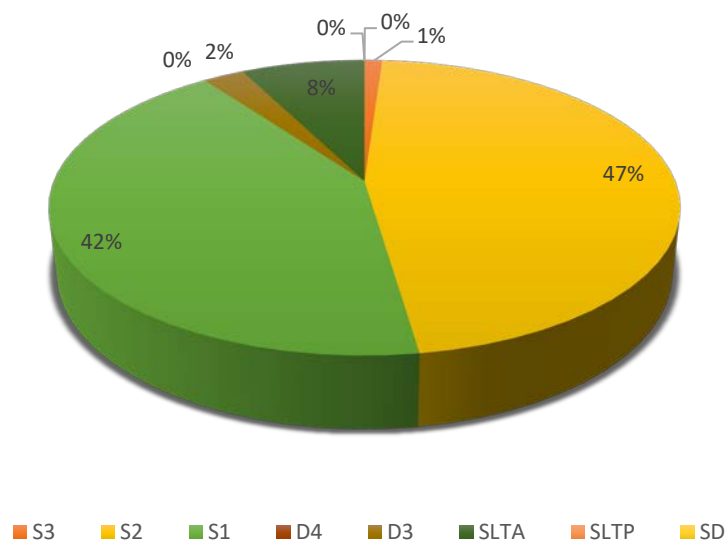
4. Pengawai fungsional umum sebanyak 57 orang di Sekretariat Itjen
5. Pegawai golongan IV sebanyak 94 orang, pegawai golongan III sebanyak 176 orang, dan pegawai golongan II sebanyak 9 orang, sebagaimana tergambar pada gambar 5. berikut:



Gambar 4. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

6. Pegawai berdasarkan dengan tingkat pendidikannya dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 orang dengan tingkat pendidikan S3
 - 130 orang dengan tingkat pendidikan S2

- 118 orang dengan tingkat pendidikan S1
- 0 orang dengan tingkat pendidikan D4
- 7 orang dengan tingkat pendidikan D3
- 21 orang dengan tingkat pendidikan SLTA
- 0 orang dengan tingkat pendidikan SLTP
- 0 orang dengan tingkat pendidikan SD



Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023.

2.1 Visium

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 adalah:

“Pertanian yang **Maju, Mandiri dan Modern** untuk Terwujudnya Indonesia **Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern dan terkini berbasis kawasan pertanian.

Untuk mendukung visi Kementerian Pertanian serta arahan Menteri Pertanian tersebut, maka Visium yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama lima tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peran dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah:

“Menjadi **Mitra Miyatani** dalam mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian yang **Maju, Mandiri dan Modern**”

Tabel 1. Penjabaran dan definisi visium Inspektorat Jenderal

Uraian	Definisi
Mitra	Teman atau sahabat, hal ini bermaksud bahwa Inspektorat Jenderal dianggap sebagai teman dalam kedudukan yang setara bagi pelaksana program pembangunan pertanian. Visi ini diturunkan ke dalam paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal, dimana Inspektorat Jenderal berperan sebagai <i>Quality Assurance dan Consultative Partner</i> .
Miyatani	Berasal dari bahasa sansekerta yang berarti dipercaya, yang dimaksud bahwa dengan kapabilitas SDM Itjen yang meningkat serta pemanfaatan teknologi informasi, maka Itjen sebagai APIP dianggap andal, profesional dan berintegritas;
Pengelola Program Pembangunan Pertanian	Seluruh pejabat dan penanggung jawab program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian;
Maju	Menjadikan pertanian yang terus bergerak ke depan, memiliki aksi dan dinamika perubahan terus menerus kepada sesuatu yang lebih baik
Mandiri	Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat
Modern	Terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Era revolusi industri 4.0, Pertanian harus sudah memanfaatkan teknologi mutakhir

2.2 Arah Pengawasan

Visi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 diatas diwujudkan melalui 3 (tiga) Misi sebagai bentuk pencapaian Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern, meliputi:

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Dalam menerapkan misi Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mendukung pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui arah pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian;
2. Mewujudkan penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai wewenang Inspektorat Jenderal;
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target program strategis, program prioritas dan program super prioritas Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) melakukan refokusing kebijakan pengawasan melalui tagline “Jaga Pangan, Jaga Masa Depan” yaitu: (1) Berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas; (2) Membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mewujudkan ketahanan pangan; (3) Mewujudkan kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran; (4) Membangun sistem pelaporan yang terintegrasi melalui pembangunan pertanian cepat tepat dan akurat; dan (5) Membangun kemitraan strategis dengan stakeholder pertanian.

Untuk mendukung Jaga Pangan Jaga Masa Depan, seluruh pimpinan dan jajaran Itjentan terutama auditor, harus paham terhadap program Kementerian Pertanian dan merubah cara berpikir, serta cara bertindak/bekerja. Selain melakukan perubahan fundamental pola berpikir dan cara bertindak, Itjentan memandang perlu membangun sinergi dengan APH untuk mewujudkan ketahanan. Sinergitas tersebut dimaksudkan untuk mengawal tercapainya program Kementerian Pertanian secara bersama-sama, sehingga dapat membantu keberhasilan provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat yang juga menjadi keberhasilan program pertanian secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN. Akhirnya, program ketahanan pangan tercapai sebagai modalitas dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022 – 2024, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan refokusing kebijakan pengawasan yang disebut dengan Program Jaga Pangan Jaga Masa Depan.

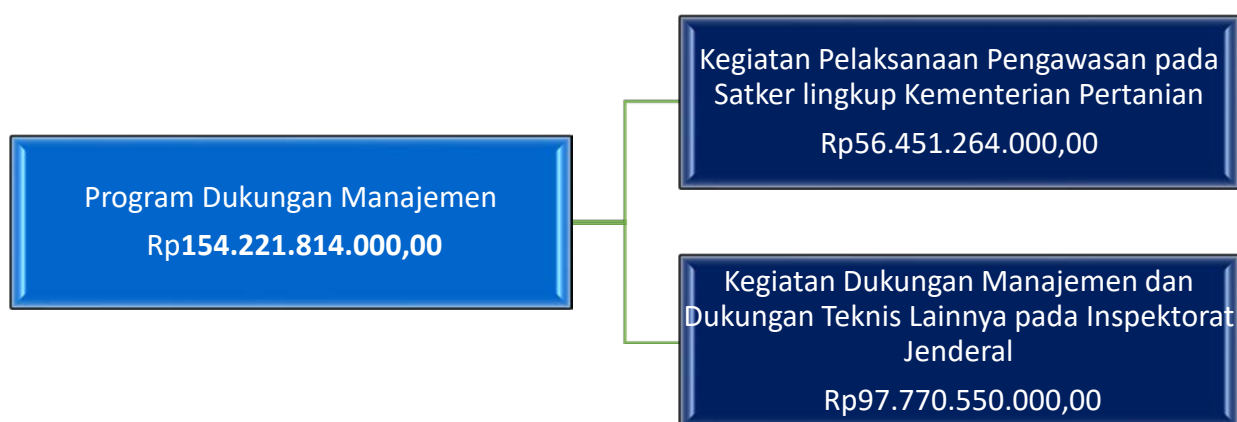
Refokusing kebijakan pengawasan tersebut merubah pola pengawasan Inspektorat Jenderal secara *on the spot* dengan fokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas Kementerian Pertanian yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023

Untuk mengukur pencapaian Visium, Misi, dan Tujuan, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, berikut dapat dilihat Perjanjian Kinerja dan anggaran pada tabel 2 dan gambar 6 berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2023

NO.	Sasaran Strategis		PERJANJIAN KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1.1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	33,91
		1.2	Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)	Level	3,00
		1.3	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Kementan	Level	3,00
		1.4	Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	%	85,00
		1.5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementan	%	90,00
		1.6	Persentase Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementan yang ditindaklanjuti	%	85,00
2	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	2.1	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen	Nilai	90,00



Gambar 6. Alokasi Anggaran Itjen dan masing-masing Kegiatan

BAB III

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

3.1 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2023 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp154.221.814.000,00. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp59.376.607.123,00 atau 38,50% dengan realisasi fisik sebesar 177 laporan atau 28,69% dari target 617 laporan.

Tabel 3. Realisasi Anggaran dan Output Kegiatan

Unit Kerja	Anggaran			Output		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
Sekretariat	56.451.264.000	22.643.702.581	40,11	110	54	49,09
Inspektorat I	20.549.386.000	9.036.045.655	43,97	118	32	27,12
Inspektorat II	20.350.000.000	6.466.559.764	31,78	98	33	33,67
Inspektorat III	20.111.872.000	8.997.033.160	44,73	105	30	28,57
Inspektorat IV	20.100.691.000	6.608.034.163	32,87	114	47	41,23
Inspektorat Investigasi	16.658.601.000	5.625.231.800	33,77	72	6	8,33
Total	154.221.814.000	59.376.607.123	38,50	617	202	32,74

Sumber: Kelompok Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal

Dalam rangka reviu rencana kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan revisi anggaran dengan melakukan penyesuaian alokasi dana yang tersedia dalam DIPA, revisi dilakukan terhadap beberapa akun dalam satu *output*/sub *output* dengan tetap memperhatikan sasaran serta tidak mengurangi volume *output* kegiatannya. Sampai dengan Juni 2023, Inspektorat melakukan 3 kali revisi DIPA dan 8 kali revisi RKA-KL yang berpedoman kepada PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Desember 2022 – Revisi DIPA _ DJA

Revisi dalam rangka optimalisasi kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal sebagai tindak lanjut *Automatic Adjustment* dan revisi pembukaan blokir lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2023.

2. Tanggal 15 Februari 2023 – Revisi DIPA – Kanwil DJPB

Revisi anggaran dalam rangka penyesuaian rencana kerja satker Inspektorat Jenderal, revisi dalam satu KRO/RO pada satu kegiatan dan satu program.

3. Tanggal 15 April 2023 – Revisi DIPA_DJA

Revisi dalam rangka optimalisasi kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal sebagai tindak lanjut *Automatic Adjustment* Tahap II dan revisi pemutakhiran rencana

penarikan dana/anggaran lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun anggaran 2023

3.2 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Realisasi belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai; Belanja Barang; dan Belanja Modal; Realisasi Belanja menurut jenis belanja disajikan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Realisasi Anggaran Itjentan per Jenis Belanja

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	23.213.360.000	11.663.517.959	50,24
52	Belanja Barang	124.155.749.000	46.052.195.861	37,09
53	Belanja Modal	6.852.705.000	1.695.347.868	24,74
Jumlah		154.221.814.000	59.411.061.688	38,52

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong peningkatan kinerja yang akuntabel Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Semester I Tahun 2023 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan.

Tabel 5. Target dan Realisasi Anggaran dan Output Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH OUTPUT			
		PAGU	REALISASI		TARGET		REALISASI	
		Rp.	Rp.	%			OUTPUT	%
I	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	56.451.264.000	22.643.702.581	40,11	110		54	49,09
1	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4.158.196.000	1.390.634.347	33,44	24	Lay	12	Lay
2	Layanan Umum	6.592.526.000	2.905.005.299	44,07	24	Lay	12	Lay
3	Layanan Data dan Informasi	3.053.166.000	1.225.178.732	40,13	12	Lay	6	Lay
4	Layanan Perkantoran	28.533.749.000	13.839.506.887	48,50	24	Lay	12	Lay
5	Layanan Sarana Internal	6.852.705.000	1.695.347.868	24,74	2	Unit	0	Unit
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.057.462.000	1.205.034.448	19,89	12	Dok	6	Dok
7	Layanan Monitoring dan Evaluasi	1.203.460.000	382.995.000	31,82	12	Dok	6	Dok
II	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Kementerian Pertanian	97.770.550.000	36.732.904.542	37,57	507		148	29,19
	Layanan Pengawasan Internal	97.770.550.000	36.732.904.542	37,57				
	INSPEKTORAT I	20.549.386.000	9.036.045.655	43,97	118		32	27,12
1	Audit Kinerja	3.792.084.000	1.041.140.284	27,46	51	Lap	9	Lap
2	Pengawasan SPIP	1.813.320.000	1.232.754.832	67,98	24	Lap	9	Lap
3	Evaluasi SAKIP Eselon I	162.576.000	80.327.000	49,41	4	Lap	0	Lap
4	Reviu LK dan RKAKL Eselon I	938.883.000	268.216.700	28,57	27	Lap	8	Lap
5	Layanan Audit Internal	13.842.523.000	6.413.606.839	46,33	12	Lap	6	Lap
	INSPEKTORAT II	20.350.000.000	6.466.559.764	31,78	98		33	33,67
1	Audit Kinerja	3.860.580.000	1.159.587.900	30,04	50	Lap	7	Lap
2	Pengawasan SPIP	1.100.322.000	501.702.800	45,60	18	Lap	1	Lap
3	Evaluasi SAKIP Eselon I	78.376.000	45.072.000	57,51	2	Lap	0	Lap
4	Reviu LK dan RKAKL Eselon I	449.612.000	333.252.500	74,12	16	Lap	19	Lap
5	Layanan Audit Internal	14.861.110.000	4.426.944.564	29,79	12	Lap	6	Lap
	INSPEKTORAT III	20.111.872.000	8.997.033.160	44,73	105		30	28,57
1	Audit Kinerja	3.598.896.000	1.721.913.092	47,85	51	Lap	14	Lap
2	Pengawasan SPIP	1.455.096.000	542.559.100	37,29	24	Lap	0	Lap
3	Evaluasi SAKIP Eselon I	107.964.000	82.521.400	76,43	2	Lap	1	Lap
4	Reviu LK dan RKAKL Eselon I	820.038.000	295.574.200	36,04	16	Lap	9	Lap
5	Layanan Audit Internal	14.129.878.000	6.354.465.368	44,97	12	Lap	6	Lap
	INSPEKTORAT IV	20.100.691.000	6.608.034.163	32,87	114		47	41,23
1	Audit Kinerja	3.581.196.000	603.560.700	16,85	51	Lap	16	Lap
2	Pengawasan SPIP	1.440.096.000	627.298.940	43,56	24	Lap	8	Lap
3	Evaluasi SAKIP Eselon I	88.764.000	71.498.100	80,55	3	Lap	3	Lap
4	Reviu LK dan RKAKL Eselon I	438.120.000	110.268.100	25,17	24	Lap	14	Lap

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH OUTPUT			
		PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI		
		Rp.	Rp.	%		OUTPUT	%	
5	Layanan Audit Internal	14.552.515.000	5.195.408.323	35,70	12 Lap	6 Lap		
	INSPEKTORAT INVESTIGASI	16.658.601.000	5.625.231.800	33,77	72	6		8,33
1	Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu	4.427.700.000	1.145.106.000	25,86	60	0 Lap		
2	Layanan Audit Internal Inspektorat Investigasi	12.230.901.000	4.480.125.800	36,63	12 Lap	6 Lap		

Berdasarkan tabel 5, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran semester I Tahun 2023 senilai Rp59.376.607.123,00 atau 38,50% dari target senilai Rp154.221.814.000,00 sedangkan realisasi fisik sebesar 177 laporan atau 28,69% dari target sebesar 617 *output*. Berdasarkan hasil monitoring, terdapat kegiatan Evaluasi SAKIP Eselon I pada Inspektorat I dan Inspektorat II yang telah dilaksanakan namun laporan kegiatan masih dalam proses penyelesaian. Selain itu juga belum terlaksananya kegiatan Pengawasan SPIP lingkup Inspektorat IV, untuk kegiatan terdapat kegiatan Audit dengan Tujuan Tertentu pada Inspektorat Investigasi namun belum terdapat laporan kegiatan.

Sampai dengan Juni 2023 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan Jaga Pangan, Jaga Masa Depan di 6 (enam) provinsi, antara lain kegiatan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, sinergi APIP dan APH, dan rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6. Rekapitulasi Kegiatan Mendukung Jaga Pangan

No	Tanggal	Provinsi	Kegiatan	Narasumber
1	23 Februari 2023	Jawa Tengah	Pengawasan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah	BPKP Provinsi Jawa Tengah
				Ditjen TP
				Inspektorat Investigasi
				Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
2	27 Februari 2023	Yogyakarta	Pengawasan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah	Direktur Jenderal Tata Ruang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
				Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
				Kejaksaan Tinggi DIY
				UGM

No	Tanggal	Provinsi	Kegiatan	Narasumber
3	7 Maret 2023	Sulawesi Selatan	Sinergi APIP dan APH Mendukung Sektor Pertanian dan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Se-Sulawesi	Menteri Pertanian
				Kejaksaan
				Satgas Pangan Polri
				BPKP Bidang PIP
				Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
				Direktorat Jenderal Tata Ruang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
				Ditjen PSP
				UGM
4	20 Maret 2023	Sumatera Selatan	Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Sinergi APIP dan APH Mendukung Sektor Pertanian dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	Bareskrim Polri
				Jaksa Agung Muda Intelijen
				Bareskrim
				Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
				Bupati Banyuasin
				UGM
				Universitas Sriwijaya
5	11 Mei 2023	Jawa Timur	Sinergi APIP dan APH Mengawal Program Pertanian dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Provinsi Jawa Timur	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
				BPKP
				Polda Jawa Timur
				UGM
				Ditjen PSP
				Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
				Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
				Inspektorat Investigasi

No	Tanggal	Provinsi	Kegiatan	Narasumber
6	30 Mei 2023	Jawa Barat	Jaga Pangan, Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Kementerian PUPR Kasatgas Pangan Polri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jaksa Agung Muda Intelijen

Berikut hasil pencapaian kinerja pada unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian:

4.1 Inspektorat I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Realisasi anggaran Inspektorat I per 30 Juni 2023 senilai Rp9.036.045.655,00 atau 43,97% dari pagu anggaran Rp20.549.386.000,00. Untuk target *output* sebanyak 118 laporan dengan realisasi *output* semester I sebanyak 32 laporan atau 27,12%, dengan rincian seperti pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Rincian Anggaran dan *Output* Inspektorat I

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran			Jumlah <i>Output</i>				
		Pagu	Realisasi		Target		Realisasi		
		Rp.	Rp.	%				<i>Output</i>	%
	Inspektorat I	20.549.386.000	9.036.045.655	43,97	118		32		27,12
1	Audit Kinerja	3.792.084.000	1.041.140.284	27,46	51	Lap	9	Lap	17,65
2	Pengawalan SPIP	1.813.320.000	1.232.754.832	67,98	24	Lap	9	Lap	37,50
3	Evaluasi SAKIP Eselon I	162.576.000	80.327.000	49,41	4	Lap	0	Lap	-
4	Reviu LK dan RKAKL Eselon I	938.883.000	268.216.700	28,57	27	Lap	8	Lap	29,63
5	Layanan Audit Internal Inspektorat I	13.842.523.000	6.413.606.839	46,33	12	Lap	6	Lap	50,00

Sumber: Kelompok Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal

4.2 Inspektorat II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit

organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Realisasi anggaran Inspektorat II per 30 Juni 2023 senilai Rp6.466.559.764,00 atau 31,78% dari pagu anggaran Rp20.350.000.000,00. Untuk target *output* 98 laporan dengan realisasi *output* semester I sebanyak 33 laporan atau 33,67%, dengan rincian seperti pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Rincian Anggaran dan Output Inspektorat II

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu	Realisasi		Target		Realisasi		
		Rp.	Rp.	%			Output		%
	Inspektorat II	20.350.000.000	6.466.559.764	31,78	98		33		33,67
1	Audit Kinerja	3.860.580.000	1.159.587.900	30,04	50	Lap	7	Lap	14,00
2	Pengawasan SPIP	1.100.322.000	501.702.800	45,60	18	Lap	1	Lap	5,56
3	Evaluasi SAKIP Eselon I	78.376.000	45.072.000	57,51	2	Lap	0	Lap	-
4	Reviu LK dan RKAKL Eselon I	449.612.000	333.252.500	74,12	16	Lap	19	Lap	118,75
5	Layanan Audit Internal Inspektorat II	14.861.110.000	4.426.944.564	29,79	12	Lap	6	Lap	50,00

Sumber: Kelompok Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal

4.3 Inspektorat III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawasan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal.

Realisasi anggaran Inspektorat III per 30 Juni 2023 senilai Rp20.111.872.000,00 atau 44,73% dari pagu anggaran Rp20.111.872.000,00. Untuk target *output* 105 laporan dengan realisasi *output* semester I sebanyak 30 laporan atau 28,57%, dengan rincian seperti pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Rincian Anggaran dan Output Inspektorat III

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu	Realisasi		Target		Realisasi		
		Rp.	Rp.	%			Output		%
	Inspektorat III	20.111.872.000	8.997.033.160	44,73	105		30		28,57
1	Audit Kinerja	3.598.896.000	1.721.913.092	47,85	51	Lap	14	Lap	27,45
2	Pengawasan SPIP	1.455.096.000	542.559.100	37,29	24	Lap	0	Lap	-

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu	Realisasi		Target		Realisasi		
		Rp.	Rp.	%			Output		%
3	Evaluasi SAKIP Eselon I	107.964.000	82.521.400	76,43	2	Lap	1	Lap	50,00
4	Reviu LK dan RKAKL Eselon I	820.038.000	295.574.200	36,04	16	Lap	9	Lap	56,25
5	Layanan Audit Internal Inspektorat III	14.129.878.000	6.354.465.368	44,97	12	Lap	6	Lap	50,00

Sumber: Kelompok Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal

4.4 Inspektorat IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawasan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Jenderal, dan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian.

Realisasi anggaran Inspektorat IV per 30 Juni 2023 senilai Rp6.608.034.163,00 atau 32,87% dari pagu anggaran Rp20.100.691.000,00. Untuk target *output* 114 laporan dengan realisasi *output* semester I sebanyak 47 laporan atau 41,23%, dengan rincian seperti pada tabel 10 berikut:

Tabel 10. Rincian Anggaran dan Output Inspektorat IV

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu	Realisasi		Target		Realisasi		
		Rp.	Rp.	%			Output		%
	Inspektorat IV	20.100.691.000	6.608.034.163	32,87	114		47		41,23
1	Audit Kinerja	3.581.196.000	603.560.700	16,85	51	Lap	16	Lap	31,37
2	Pengawasan SPIP	1.440.096.000	627.298.940	43,56	24	Lap	8	Lap	33,33
3	Evaluasi SAKIP Eselon I	88.764.000	71.498.100	80,55	3	Lap	3	Lap	100,00
4	Reviu LK dan RKAKL Eselon I	438.120.000	110.268.100	25,17	24	Lap	14	Lap	58,33
5	Layanan Audit Internal Inspektorat IV	14.552.515.000	5.195.408.323	35,70	12	Lap	6	Lap	50,00

Sumber: Kelompok Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal

4.5 Inspektorat Investigasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu serta upaya pencegahan korupsi.

Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi per 30 Juni 2023 senilai Rp5.625.231.800,00 atau 33,77% dari pagu anggaran Rp16.658.601.000,00. Untuk target *output* 72 laporan dengan realisasi *output* semester I sebanyak 6 laporan atau 8,33%, dengan rincian seperti pada tabel 11 berikut:

Tabel 11. Rincian Anggaran dan Output Inspektorat Investigasi

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu	Realisasi		Target		Realisasi		
		Rp.	Rp.	%			Output		%
	Inspektorat Investigasi	16.658.601.000	5.625.231.800	33,77	72		6		8,33
1	Audit dengan Tujuan Tertentu	4.427.700.000	1.145.106.000	25,86	60	Lap	0	Lap	-
2	Layanan Audit Internal Inspektorat Investigasi	12.230.901.000	4.480.125.800	36,63	12	Lap	6	Lap	50,00

Sumber: Kelompok Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal

4.6 Sekretariat Itjentan

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

Realisasi anggaran per 30 Juni 2023 realisasi anggaran senilai Rp22.643.702.581,00 atau 40,11% dari pagu anggaran Rp56.451.264.000,00. Untuk realisasi *output* semester I sebanyak 54 dari target 110 *output* atau 49,09% dengan rincian seperti pada tabel 12 berikut:

Tabel 12. Rincian Anggaran dan Output Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu	Realisasi		Target		Realisasi		
		Rp.	Rp.	%			Output		%
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Layanan Perkantoran	56.451.264.000	22.643.702.581	40,11	110		54		49,09
1	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4.158.196.000	1.390.634.347	33,44	24	Lay	12	Lay	50,00
2	Layanan Umum	6.592.526.000	2.905.005.299	44,07	24	Lay	12	Lay	50,00
3	Layanan Data dan Informasi	3.053.166.000	1.225.178.732	40,13	12	Lay	6	Lay	50,00
4	Layanan Perkantoran	28.533.749.000	13.839.506.887	48,50	24	Lay	12	Lay	50,00
5	Layanan Sarana Internal	6.852.705.000	1.695.347.868	24,74	2	Unit	0	Unit	00,00
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.057.462.000	1.205.034.448	19,89	12	Dok	6	Dok	50,00
7	Layanan Monitoring dan Evaluasi	1.203.460.000	382.995.000	31,82	12	Dok	6	Dok	25,00

Sumber: Kelompok Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal

Berikut disampaikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

4.6.1 Bagian Umum

1) Pengelolaan Keuangan

Tahun 2023 Inspektorat Jenderal memperoleh Uang Persediaan (UP) yaitu uang muka kerja dari KPPN yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker senilai Rp1.000.000.000,00 berupa uang tunai senilai Rp600.000.000,00 dan kartu Kredit Pemerintah (KKP) senilai Rp400.000.000,00. Semester I Tahun 2023, Itjen telah mengajukan 14 GUP dan 5 GUP KKP.

2) Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Semester I TA. 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Laporan Keuangan ini meliputi:

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA. 2023 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara Semester I tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp59.068.018,00 atau mencapai 393,79 persen (pembulatan 394 persen) dari estimasi Pendapatan-LRA senilai Rp15.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara Semester I Tahun 2023 adalah senilai Rp59.376.607.123,00 atau mencapai 38,50 (pembulatan 39 persen) dari alokasi anggaran senilai Rp154.221.814.000,00.

b) Neraca

Neraca Semester I TA. 2023 menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai dengan 30 Juni 2023.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan senilai Rp11.093.509.924,00 yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp1.056.163.614,00 Aset Tetap (*netto*) senilai Rp9.785.968.701,00, dan Aset Lainnya (*netto*) senilai Rp251.377.609,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai Rp4.270.274.527,00 dan Rp6.823.235.397,00.

c) Laporan Operasional

Laporan Operasional Semester I TA. 2023 menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah senilai Rp4.518.018,00 , sedangkan jumlah Beban Operasional adalah senilai Rp63.541.794.408,00 sehingga Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp63.537.276.390,00. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan pos Luar Biasa masing-masing senilai Rp3.850.000,00 dan nihil, sehingga entitas mengalami Defisit-LO senilai Rp63.533.426.390,00.

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Semester I TA. 2023 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah Rp11.039.122.682,00 ditambah Defisit-LO senilai Rp63.533.426.390,00 ditambah Transaksi Antar Entitas senilai Rp59.317.539.105,00 sehingga terdapat Penurunan Ekuitas senilai Rp4.215.887.285,00 dan menghasilkan Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp6.823.235.397,00.

e) Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Semester I TA. 2023 menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan menggunakan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan dengan Basis Akrua.

Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengungkapkan transaksi terkait dengan penanganan pandemi *Covid-19* sesuai dengan Permenkeu No.43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Belanja Atas Beban Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.

3) Laporan BMN

Nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna periode pelaporan per 30 Juni Tahun 2023 adalah sebesar Rp10.499.519.622,00 yang terdiri dari saldo awal senilai Rp11.067.135.065,00, serta mutasi tambah selama periode pelaporan senilai Rp2.017.343.276,00 dan mutasi kurang sebesar Rp2.584.958.719,00 (mutasi keluar dari persediaan).

Dari Total nilai BMN (sebelum dikurangi nilai penyusutan) senilai Rp45.129.905.056,00, yang telah diusulkan status penggunaannya senilai Rp44.022.383.857,00 dan belum diusulkan status penggunaannya sebanyak 303 unit yaitu senilai Rp1.107.521.199,00, dan saat ini statusnya sedang diproses dengan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor. B-2655/PL.300/G.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Usulan Penetapan status penggunaan BMN dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta.

4.6.2 Kelompok Perencanaan dan Evaluasi

1) Pelaksanaan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2023 – 2024

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 terhadap seluruh K/L/D di Indonesia.

Penyusunan Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien. Tujuan dari Stranas PK adalah sebagai berikut: 1) memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi; 2) mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) bukan hanya luaran kegiatan (*output*) dengan capaian yang terukur; dan 3) meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun dengan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menteri, Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PK kepada

Timnas PK setiap 3 (tiga) bulan sekali. Timnas PK menyampaikan laporan pelaksanaan Stranas PK kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Fokus Stranas PK meliputi: 1) Perizinan dan tata niaga; 2) Keuangan negara; dan 3) penegakan hukum dan reformasi birokrasi, namun Kementerian Pertanian mendapatkan tugas pada fokus 1 dan 2. Secara nasional capaian umum Stranas PK sebesar 10,59% pada periode B06 dari semua K/L/D dengan capaian 4,48% pada periode B03 .

Berdasarkan pada Aksi Stranas PK Tahun 2023-2024 periode B06 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai *focal point* telah melakukan monitoring lingkup Kementerian Pertanian. Aksi Stranas PK di Kementerian Pertanian telah mencapai skor rata-rata 15,51 dari 7 aksi yang diampu Kementerian Pertanian, dengan rincian:

- a) Aksi 1 : Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta dengan skor 49,70;
- b) Aksi 2 : Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor dengan skor 1,67;
- c) Aksi 3 : Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/*Beneficial Ownership* serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Penanganan Perkara dengan skor 19,38;
- d) Aksi 4 : Reformasi Tata Kelola Pelabuhan dengan skor 13,33;
- e) Aksi 6 : Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024 dengan skor 3,50;
- f) Aksi 7 : Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan skor 0,00;
- g) Aksi 10 : Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK untuk Program Pemerintah dengan skor 21,02.

2) Pelaksanaan IACM

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, terdapat konsep pengawasan intern yang mencakup kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang secara umum bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan pelaksanaan peran tersebut, kapabilitas dan efektivitas APIP dianggap sebagai dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP, sebagai institusi telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sesuai dengan

Peraturan BPKP nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas APIP Pada K/L/PD, rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri.

Sesuai dengan laporan hasil validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2022, menunjukkan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berada di level 3 dengan skor 3,245 (*Delivered*). Rekomendasi yang diberikan agar Inspektorat Jenderal menyusun rencana tindak lanjut untuk menuju ke Level 4 (*Institutionalized*) sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementan Tahun 2020-2024 secara bertahap dengan KPA untuk masing-masing elemen.

4.6.3 Kelompok Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas (OKHH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 11 menyebutkan bahwa pegawai ASN bertugas: melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan kinerja Pegawai maka diperlukanlah manajemen kepegawaian dimana manajemen kepegawaian adalah suatu bentuk pengelolaan terkait dengan administrasi dalam suatu instansi yang merupakan tugas dari pada bagian kepegawaian dan organisasi tata laksana.

Pembinaan hubungan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah, pengelolaan pemberitaan, pengelolaan opini publik, dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui PPID serta layanan perpustakaan serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, advokasi, dan rancangan perjanjian.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas sampai bulan Juni 2023 sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan diklat sebanyak 10 kali, dengan rincian pada tabel 13 berikut:

Tabel 13. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

NO.	URAIAN	TANGGAL	JUMLAH PESERTA	TEMPAT PELAKSANAAN
1	Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama	E-learning 3 s.d. 16 Maret 2023 Tatap Muka 27 Maret s.d. 11 April 2023	1 Orang	Pusdiklatwas BPKP, Ciawi-Bogor
2	Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama	Menunggu surat penetapan dari BPKP	9 Orang	Pusdiklatwas BPKP, Ciawi-Bogor
3	Diklat Penjurangan Auditor Ahli Muda	E-learning 28 Maret s.d. 6 April 2023 Tatap Muka 4 s.d. 15 Mei 2023	7 Orang	Pusdiklatwas BPKP, Ciawi-Bogor
4	Diklat Penjurangan Auditor Ahli Muda	Proses usul diklat ke BPKP	8 Orang	Pusdiklatwas BPKP, Ciawi-Bogor
5	CGCAE (Certification of Government Chief Audit Executive)	Pelatihan mandiri (e-learning) 9 s.d 24 Maret 2023 Pelatihan tatap muka 27 s.d 30 Maret 2023 Uji Kompetensi 11 – 12 April 2023	3 Orang	Pusdiklatwas BPKP, Ciawi-Bogor
6	CGCAE (Certification of Government Chief Audit Executive)	Menunggu surat penetapan dari BPKP	1 Orang	Pusdiklatwas BPKP, Ciawi-Bogor
7	Diklat IT Auditor (information Technology Auditor)	8 - 11 Mei 2023	1 Orang	Bogor
8	CGAA (Certified Government Accounting Associate)	5 - 8 Juni 2023	1 Orang	Bogor
9	QRMA (Qualified Risk Management Analyst)	12 - 14 Juni 2023	1 Orang	Bogor
10	CGAE (Certified Government Accounting Expert Level-1)	7 - 10 Agustus 2023	1 Orang	Bogor

- 2) Penerbitan Media Auditor Edisi 62 dengan tema “Optimalisasi Peran Inspektorat Jenderal dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Indonesia”.

3) Penilaian Karya Tulis Ilmiah sebanyak 1 (satu) kali penilaian.

4.6.4 Kelompok Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan (DPLHP)

Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan terhadap seluruh laporan hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, BPKP dan BPK-RI. Tujuan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah untuk mendorong auditee (obyek pengawasan) untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi auditor yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan, baik yang berupa rekomendasi yang bersifat administratif, substansi teknis, ketatalaksanaan maupun rekomendasi kerugian negara untuk disetorkan ke Kas Negara. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dikemukakan sebagai berikut:

1) Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal

Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 diketahui bahwa terdapat 96 LHP dengan rekomendasi administrasi sebanyak 1.540 dengan temuan kerugian negara senilai Rp2.496.241.362,41 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 188 rekomendasi administrasi dan temuan kerugian negara senilai Rp2.231.766.119,16 sehingga masih terdapat sisa rekomendasi administrasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.261 rekomendasi dengan temuan kerugian negara senilai Rp264.475.243,25.

Berikut data hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 per 30 Juni 2023 secara rinci pada tabel 14:

Tabel 14. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No	Eselon I	Jml LHP	Rekomendasi			Tindak Lanjut			Sisa		
			Adm	KN	Nilai	Adm	KN	Nilai	Adm	KN	Nilai
1	Sekretariat Jenderal	10	101	0	0	9	0	0	92	0	0
2	Inspektorat Jenderal	2	8	0	0	3	0	0	0	0	0
3	Ditjen Tanaman Pangan	8	300	11	82.247.337,23	8	9	19804843,23	292	2	62.442.494,00
4	Ditjen Hortikultura	10	245	21	192.346.388,84	92	17	180.877.888,84	153	4	11.468.500,00
5	Ditjen Perkebunan	9	95	4	14.194.025,00	9	4	14.194.025,00	0	0	0
6	Ditjen PKH	15	370	27	1.911.448.541,59	0	0	1.900.165.809,59	370	27	11.282.732,00
7	Ditjen PSP	11	153	5	36.274.040,22	25	1	4.590.000,00	128	4	31.684.040,22
8	BSIP	2	21	0	0	0	0	0	21	0	0
9	BPPSDMP	11	102	15	95.906.684	1	14	82.637.394	101	1	13.269.290
10	Barantan	18	145	17	163.824.345,53	41	8	29.496.158,50	104	9	134.328.187,03
Total		96	1.540	100	2.496.241.362,41	188	53	2.231.766.119,16	1.261	47	264.475.243,25

Sumber Data: Kelompok DPLHP

Jumlah kerugian negara hasil pengawasan Inspektorat Jenderal sampai dengan posisi 30 Juni 2023 diketahui terdapat 12.623 kejadian dengan kerugian negara senilai telah ditindaklanjuti sebanyak 11.953 kejadian dengan nilai tindaklanjut senilai Rp386.285.902.060,00 dan telah ditindaklanjuti senilai Rp340.825.224.284,00 atau 88,23% (12.127 kejadian) dan masih terdapat sisa temuan yang belum ditindaklanjuti senilai Rp45.460.677.776,00 atau 11,77% (496 kejadian).

Berikut rekapitulasi temuan kerugian negara hasil pengawasan Inspektorat Jenderal sampai dengan 30 Juni 2023 secara rinci pada tabel 15.

Tabel 15. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal

NO	ESELON I	Kementerian Pertanian						
		TEMUAN AWAL		Tindak Lanjut		Sisa		
		Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	214	7.033.724.801,21	193	5.496.157.513,71	21	1.537.567.287,50	21,86
2	Inspektorat Jenderal	8	111.609.179,00	8	111.609.179,00	0	-	0,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	1.371	130.606.561.881,63	1.274	114.923.314.492,54	97	15.683.247.389,09	12,01
4	Ditjen Hortikultura	2.145	30.260.866.155,97	2.002	24.327.420.432,05	143	5.933.445.723,92	19,61
5	Ditjen Perkebunan	425	48.890.353.392,76	323	43.636.061.881,51	102	5.254.291.511,25	10,75
6	Ditjen PKH	1.942	64.461.275.641,57	1.892	54.821.266.832,92	50	9.640.008.808,65	14,95
7	Ditjen PSP	853	31.338.647.014,88	810	26.309.303.429,19	43	5.029.343.585,69	16,05
8	BSIP	2.605	38.427.678.002,34	2.575	36.192.502.009,47	30	2.235.175.992,87	5,82
9	BPPSDMP	1.493	19.133.188.088,23	1.492	19.119.918.798,23	1	13.269.290,00	0,07
10	Barantan	1.567	16.021.997.902,31	1.558	15.887.669.715,28	9	134.328.187,03	0,84
Jumlah		12.623	386.285.902.060	12.127	340.825.224.284	496	45.460.677.776	
%				96,07	88,23	3,93	11,77	

Sumber Data: Kelompok DPLHP

Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi dan Audit Tujuan Tertentu

Hasil pemeriksaan Inspektorat Investigasi terhadap perkembangan penyelesaian temuan kerugian negara hasil audit investigasi sampai bulan Juni 2023, dapat disampaikan bahwa terdapat temuan senilai Rp62.318.961.647,67 (238 kejadian), telah diselesaikan senilai Rp51.638.157.059,01 (209 kejadian) atau 82,86%, sehingga sisanya senilai Rp10.680.804.588,66 atau 17,14%. Secara rinci jumlah temuan kerugian negara hasil pemeriksaan audit investigasi pada tabel 16 berikut:

Tabel 16. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Audit Investigasi

NO.	ESELON I	Kementerian Pertanian						
		TEMUAN AWAL		Tindak Lanjut		Sisa		%
		Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	
1	Sekretariat Jenderal	8	2.483.409.417,66	4	739.328.904,00	4	1.744.080.513,66	70,23
2	Inspektorat Jenderal	0	-	0	-	0	-	0,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	32	6.096.342.927,27	30	5.379.977.427,27	2	716.365.500,00	11,75
4	Ditjen Hortikultura	7	1.548.750.279,00	6	616.868.729,00	1	931.881.550,00	60,17
5	Ditjen Perkebunan	23	19.742.152.741,40	15	16.745.751.561,40	8	2.996.401.180,00	15,18
6	Ditjen PKH	38	2.938.898.770,00	35	2.291.851.975,00	3	647.046.795,00	22,02
7	Ditjen PSP	46	19.192.049.331,61	39	17.222.551.705,61	7	1.969.497.626,00	10,26
8	BSIP	40	5.051.180.893,73	39	3.615.795.293,73	1	1.435.385.600,00	28,42
9	BPPSDMP	15	996.787.526,00	14	852.887.526,00	1	143.900.000,00	14,44
10	Barantan	14	3.814.669.565,00	14	3.814.669.565,00	0	-	0
Jumlah		238	62.318.961.647,67	209	51.638.157.059,01	29	10.680.804.588,66	
%				87,82	82,86	12,18	17,14	

Sumber Data: Kelompok DPLHP

Hasil pemeriksaan Inspektorat Investigasi terhadap perkembangan penyelesaian temuan kerugian negara hasil audit tujuan tertentu sampai bulan Juni 2023, dapat disampaikan bahwa terdapat temuan senilai Rp98.778.186.000,38 (509 kejadian), telah diselesaikan senilai Rp65.744.970.048,97 (434 kejadian) atau 66,56%, sehingga sisanya senilai Rp33.033.215.951,41 atau 33,44%. Secara rinci jumlah temuan kerugian negara hasil pemeriksaan audit Investigasi pada tabel 17 berikut:

Tabel 17. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Audit Tujuan Tertentu

NO	ESELON I	Kementerian Pertanian						
		TEMUAN AWAL		Tindak Lanjut		Sisa		%
		Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	
1	Sekretariat Jenderal	0	-	0	-	0	-	0,00
2	Inspektorat Jenderal	0	-	0	-	0	-	0,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	96	58.132.173.482,82	59	35.644.529.356,61	37	22.487.644.126,21	38,68
4	Ditjen Hortikultura	10	163.418.665,00	10	163.418.665,00	0	-	0,00
5	Ditjen Perkebunan	52	6.791.147.125,05	39	5.976.800.014,05	13	814.347.111,00	11,99
6	Ditjen PKH	52	10.916.567.952,64	44	2.963.261.201,64	8	7.953.306.751,00	72,86
7	Ditjen PSP	112	10.070.872.364,34	110	9.437.858.364,34	2	633.014.000,00	6,29
8	BSIP	109	10.541.545.647,71	94	9.396.641.684,51	15	1.144.903.963,20	10,86
9	BPPSDMP	39	795.492.861,25	39	795.492.861,25	0	-	0,00
10	Barantan	35	1.097.556.463,17	35	1.097.556.463,17	0	-	0,00
Jumlah		509	98.778.186.000,38	434	65.744.970.048,97	75	33.033.215.951,41	
%				85,27	66,56	14,73	33,44	

1) Hasil Pemeriksaan BPKP

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI diketahui bahwa terdapat 1.560 kejadian dengan jumlah temuan kerugian negara senilai Rp27.234.383.925,34. Sampai dengan posisi 30 Juni 2023 telah ditindaklanjuti sebanyak 1.540 kejadian dengan nilai tindak lanjut senilai Rp25.136.467.737,88 dan masih terdapat sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 20 kejadian dengan nilai Rp2.097.916.187,46.

Berikut rekapitulasi temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPKP posisi 30 Juni 2023 secara rinci pada tabel 18:

Tabel 18. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan BPKP

NO.	ESELON I	Kementerian Pertanian						
		TEMUAN AWAL		Tindak Lanjut		Sisa		%
		Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	
1	Sekretariat Jenderal	1	1.701.852.900,00	-	1.562.464.900,00	1	139.388.000,00	8,19
2	Inspektorat Jenderal	8	111.609.179,00	8	111.609.179,00	0	-	0,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	284	7.802.207.420,80	266	6.698.623.882,30	18	1.103.583.538,50	14,14
4	Ditjen Hortikultura	-	225.174.609,03	-	130.467.821,94	0	82.357.287,09	42,06
5	Ditjen Perkebunan	-	78.426.771,75	-	18.500.000,00	0	-	76,41
6	Ditjen PKH	-	15.343.636,00	-	7.671.818,00	0	-	50,00
7	Ditjen PSP	-	767.960.272,12	-	84.300.000,00	0	683.660.272,00	89,02
8	BSIP	488	6.441.542.172,99	488	6.441.542.172,99	0	-	0,00
9	BPPSDMP	665	7.759.875.311,57	664	7.750.896.311,57	1	8.979.000,00	0,12
10	Barantan	2	9.408.342,00	2	9.408.342,00	0	-	0,00
Jumlah		1.560	27.234.383.925,34	1.540	25.136.467.737,88	20	2.097.916.187,46	
%				98,72	92,30	1,28	7,70	

Sumber Data: Kelompok DPLHP

2) Hasil Pemeriksaan BPK RI

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI diketahui bahwa terdapat kejadian dengan jumlah temuan kerugian negara senilai Rp90.972.497.837,70, sampai dengan posisi 31 Desember 2022 telah ditindaklanjuti senilai Rp68.892.141.403,98 (157 kejadian) atau 90,23% dan masih terdapat sisa temuan yang belum ditindaklanjuti senilai Rp22.085.356.433,73 (19 kejadian) atau 28,28%.

Berikut jumlah temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPK-RI secara rinci pada tabel 19:

Tabel 19. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan BPK RI

NO.	ESELON I	Kementerian Pertanian						
		TEMUAN AWAL		Tindak Lanjut		Sisa		%
		Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	
1	Sekretariat Jenderal	3	656.181.906,56	3	656.181.906,56	0	-	0,00
2	Inspektorat Jenderal	8	111.609.179,00	8	111.609.179,00	0	-	0,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	40	63.971.364.478,86	33	54.401.380.648,36	7	9.569.983.830,50	14,96
4	Ditjen Hortikultura	8	1.871.079.466,41	8	1.871.079.466,41	0	-	0,00
5	Ditjen Perkebunan	0	1.011.519.000,00	0	153.419.000,00	0	858.100.000,00	84,83
6	Ditjen PKH	0	998.694.729,48	0	8.089.950,00	0	990.604.779,48	99,19
7	Ditjen PSP	4	1.897.298.090,00	1	346.029.210,00	3	1.551.268.880,00	81,76
8	BSIP	36	6.300.506.324,22	29	4.662.381.722,47	5	1.638.124.601,75	26,00
9	BPPSDMP	42	1.935.643.659,45	42	1.935.643.659,45	0	-	0,00
10	Barantan	2	497.989.138,00	2	497.989.138,00	0	-	0,00
Jumlah		145	79.459.985.971,98	128	64.851.903.880,25	15	14.608.082.091,73	
%				88,28	81,62	10,34	18,38	

Sumber Data: Kelompok DPLHP

Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atau tim telah selesai melaksanakan tugasnya. Sampai dengan 30 Juni 2023, terdapat 1439 penugasan. Dari 1.220 penugasan telah terbit laporan sebanyak 855 laporan atau 70,08%, sedangkan laporan belum terbit sebanyak 319 laporan atau 26,15%.

Laporan terbit terdiri dari laporan terbit tepat waktu sebanyak 285 laporan atau 23,36% dan laporan terbit terlambat sebanyak 570 laporan atau 46,72%. Laporan belum terbit terdiri dari laporan dalam masa kontrak kinerja sebanyak 3 laporan atau 0,25% dan laporan belum terbit terlambat sebanyak 316 laporan atau 25,902%. Laporan batal sebanyak 44 laporan atau 3,61%. Posisi perkembangan penerbitan laporan sampai dengan 30 Juni 2023 yang dipantau melalui aplikasi SIMWAS, dapat dilihat pada tabel 20 berikut:

Tabel 20. Penerbitan Laporan Semester I Tahun 2023

No	Unit Kerja	Terbit				Terlambat						Total ST
		Tepat Waktu		Terlambat		Masa KK		Terlambat		Batal		
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1	SES	38	12,75	144	48,32	0	0,00	115	38,59	1	0,34	298
2	IR 1	50	20,66	121	50,00	0	0,00	63	26,03	8	3,31	242
3	IR 2	46	17,56	149	56,87	0	0,00	46	17,56	21	8,02	262
4	IR 3	101	41,74	47	19,42	2	0,83	85	35,12	7	2,89	242
5	IR 4	51	24,06	92	43,40	0	0,00	63	29,72	2	0,94	212
6	IR INVES	23	12,57	55	30,05	1	0,55	91	49,73	13	7,10	183
		309		608		3		463		52		1.439

Sumber Data: Aplikasi GOWAS

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Semester I Tahun 2023 Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.